

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta;
- Asshidiqiw, Jimly. 2009. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Garafika. Jakarta;
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta;
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini*. Cetakan Pertama. PT Bulan Bintang. Jakarta;
- Basah, Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni. Bandung;
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta;
- Cekli .Cristian. dkk. 2016. *Penjelasan Hukum: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Judicial Sector Support Program Leiden-Jakarta. Jakarta;
- Effendi, Lutfi , 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Faried Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama. Bandung;
- Hadisoeperto, Hartono. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta;
- Hadjon, Philipus M, dkk. 1993. *Hukum Administrasi Negara*. Gajahmada University Press. Yogyakarta;
- Hadjon, Philipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Cet. XI, Yogyakarta;
- Hakim, Abdul. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta;

- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung;
- Hamidi, Jazim. 2015. *Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB*. Jakarta. Lebih lengkapnya lihat: Jazim Hamidi, *Penerapan AAUPPL Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999);
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketiga. Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta;
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang;
- Jauhari, Arif & Eko Nugroho, Nandra. 2017. *Karst Sebagai Fungsi Kehidupan*. Pusat Studi Karst Universitas Pembangunan Nasioanal "Veteran" .Yogyakarta;
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor;
- Lotulung, P.E. 1994. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung;
- Mahmud, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- MD, Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta;
- Mohammad,Yamin. 1952. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djambatan. Jakarta;
- Naning, Ramdlon. 1993. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta;
- Palguna ,I Dewa Gede Palguna. Ahmad, Rofiqul Umam. Tarmidzi (Ed.). 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum*

*terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* Sinar Grafika. Jakarta;

Purbopranoto, Koentjoro. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara.* Alumni. Bandung;

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung;

Ridwan, HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi).* Rajawali Press. Jakarta;

Ridwan. Huda, Ni'matul. Mandasari, Zayanti (Ed.), *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah.* Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta;

Sibuea, Hotma P. 2002 *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,* Erlangga, Jakarta;

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Raja Grafindo. Jakarta;

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif.* PT. Raja Grafindo. Jakarta;

Soeroso, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta;

Suhady, Idup. 2009. *Kepemerintahan yang Baik,* Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia;

Suhady, Idup. 2009. *Kepemerintahan yang Baik,* Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia;

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta;

Syahrani, Riduan. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum.* P.T. Alumni. Bandung;

Van Apeldoorn, L.J. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum,* terj. Oetarid Sadino. Pradnya Paramita. Jakarta;

Van der Burg, F.H dan Cartigny, G.J.M. 1994. *Buku: Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara.* Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta;

Yamin, Muhammad & Lubis, Abdul Rahim, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2951 Tahun 1970);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851 Tahun 1999);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.5601 Tahun 2014);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Thun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 2831 Tahun 1969);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833 Tahun 2008);

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

Keputusan Menteri ESDM Nomor 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong;

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3873 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong;

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

### **Jurnal/Artikel**

*Catatan dari Seminar Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Konservasi Air tanah Kawasan Karst Oleh IAGI, 21 November 2016;*

- Dokumen Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong, Kabupaten Kebumen Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Menjaga Karst Gombong, Menyelamatkan Manusia*, Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI);
- Muwahid, 2015, *Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Studi Keislaman Al Hikmah, Volume 5, Nomor 2;
- Pidato sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pencanangan Wilayah Geologi Gunung Sewu dan Gombong sebagai kawasan eko-karst, Wonosari tanggal 6 Desember 2004;
- Police Brief: Menata Karst gombong; Fungsi Lindung Yang di Usung*, LBH Semarang;
- Potensi Dan Ancaman Karst Karangbolong Kabupaten Kebumen – Provinsi Jawa Tengah*, Acubtyacunyata Speleological Club – Yogyakarta;
- Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Risalah rapat pembahasan RUU PTUN, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas RUU PTUN, Selasa, 20 Mei 1986;
- Samodra, S. 2013, *Nilai Strategis Kawasan Karst di Indonesia dan Usaha Pengelolaannya Secara Berkelanjutan*, Tulisan dalam Pelatihan Dasar Geologi untuk Pencinta Alam dan Pendaki Gunung, Kerjasama Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dengan Klub Pecinta Alam, (Bogor, 16-19 April 2003);
- Siaran Pers Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG), 26 Oktober 2018;
- Solechan, 2009. *Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3;
- Suhady, Idup. *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia. 2009;

Tinjauan Ancaman Kelangsungan dan Daya Dukung Ekosistem Esensial Karst Gombang oleh Rencana Pendirian Pabrik Semen, Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI);

Widjinarko,S. Falah, R & Suryono, T. *Potensi dan Ancaman Karst Karangbolong Kabupaten Kebumen – Provinsi Jawa Tengah*, Acintyacunyata Speleological Club – Yogyakarta, 12 februari 2019.

### **Kamus**

Cst Kansil. dkk. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

### **Berita**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. Diakses 5 Januari 2020;

Anonim, “*Perpag: Harga Mati Pengembalian KBAK Gombang Selatan*”, <http://kebumennews.com/perpag-harga-mati-pengembalian-kbak-gombang-selatan-1/>. Diakses pada 15 Oktober 2019;

Siahaan, “*DPR RI Surati Kementrian ESDM Terkait Luas KBAK Gombang*”, <http://www.lassernewstoday.com/berita/news/dpr-ri-surati-kementrian-esdm-terkait-luas-kbak-gombang/> . Diakses pada 15 Oktober 2019.

